

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Filipina adalah suatu negara yang mempunyai sejarah politik yang polemik. Sebelum menjadi sebuah negara merdeka, Filipina mengalami sejarah penjajahan yang sangat panjang, mulai dari Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang. Berakhirnya Perang Dunia II, mengisyaratkan berakhirnya masa penjajahan dan awal dari sejarah Filipina sebagai sebuah negara merdeka. Setelah merdeka, kehidupan politik di Filipina masih belum stabil, penguasanya selalu mendapat tekanan dari pihak oposisi maupun dari pihak militer.

Hal ini seperti dapat kita lihat pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos, pemerintahannya selama 21 tahun dengan kekuasaannya yang sangat besar akhirnya tumbang juga oleh kekuatan rakyat. Dan ini dialami pada masa pemerintahan Joseph Estrada yang menjadi presiden tahun 1998 sampai 2001 akhirnya tumbang juga oleh kekuatan rakyat dengan alasan bahwa Joseph Estrada terlibat kasus suap dengan bandar judi *jueteng* (sebutan judi ilegal di Filipina).

Tumbanganya Joseph Estrada kemudian mengakibatkan berpindahnya kekuasaan kepresidenan kepada Gloria Macapagal Arroyo tahun 2001 yang sebelumnya menjadi wakil presiden. Pada tahun 2003 pemerintahan Arroyo mengalami percobaan kudeta oleh pihak militer. Namun kudeta tersebut gagal, dan pada tahun 2004 Arroyo ikut dalam pencalonan Presiden dan akhirnya

menang. Padahal sebelumnya Arroyo tidak mau ikut dalam pencalonan presiden tersebut.

Pada akhir tahun 2005, Presiden Arroyo dituduh melakukan kecurangan terhadap hasil pemilu tahun 2004. Akibatnya, pihak oposisi kemudian mengajukan tuntutan *impeachment*. Namun, bayangan *impeachment* yang sebelumnya begitu dekat kepada Arroyo pada akhirnya pupus, dan Presiden Arroyo sampai saat ini masih menjadi pemegang kekuasaan di Filipina.

Dalam kesempatan ini penulis sangat tertarik untuk mengkaji keberhasilan Arroyo mempertahankan kursi kepresidenan yang tertuang melalui judul “Strategi Gloria Macapagal Arroyo Mempertahankan Kursi Kepresidenan.” Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tersebut dikarenakan selama pemerintahannya, Arroyo beberapa kali mendapatkan ancaman kudeta baik dari pihak militer maupun oposisi, namun kudeta tersebut selalu gagal.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam menulis skripsi dengan judul Strategi Gloria Macapagal Arroyo Mempertahankan Kursi Kepresidenan adalah:

1. Sebagai wahana penulis untuk mengasah kemampuan menganalisa persoalan yang terjadi. Dalam hal ini berkaitan dengan Strategi Gloria Macapagal Arroyo mempertahankan kursi kepresidenannya.
2. Sebagai wahana bagi penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wacana mengenai partisipasi politik, perkembangan politik yang

ditentukan oleh elit politik, serta kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam sebuah sistem politik, terutama di Filipina.

3. Mengaplikasikan teori yang selama ini dipelajari oleh penulis.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Filipina memperoleh kemerdekaannya dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1946. Sebagai negara bekas jajahan Amerika Serikat, Filipina juga menggunakan sistem *bicameral* dalam pemerintahannya, yakni mempunyai Senat dan Kongres (House of Representative). Negara Filipina mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Katolik. Negara Filipina telah membangkitkan partisipasi politik melalui pemilu. Selain itu, negara Filipina telah dipimpin oleh beberapa orang Presiden dan dua orang telah dijatuhkan melalui kekuatan rakyat (*people power*).

Suasana perpolitikan di Negara Filipina mengalami pasang surut, khususnya untuk sebuah negara yang sedang berkembang. Seperti kita ketahui pada masa Pemerintahan Presiden Joseph Estrada yang terpilih sebagai Presiden pada pemilu 11 Mei 1998, dengan mengungguli rival terberatnya yaitu Jose de Venesia. Hal tersebut diperoleh karena adanya dukungan dari rakyat menengah, yang disebabkan oleh janji-janji yang diberikan pada saat kampanye. Namun setelah lama berkuasa, janji-janji Estrada tak kunjung terealisasi sehingga

mengakibatkan krisis politik dan Estrada juga terlibat kasus suap dengan bandar judi *jueteng*.

Pada tanggal 18 September 2000, 42 anggota parlemen telah mengajukan mosi *Impeachment* terhadap Estrada. Pada tanggal 4 Januari 2001 posisi Presiden Estrada semakin terpuruk setelah pengadilan *Impeachment* atas dirinya. Namun kemudian, 11 anggota Kongres yang tergabung dalam tim penuntut mengundurkan diri, karena adanya kekuatan yang membuat mereka sulit memperoleh keputusan yang jujur.

Keputusan Senat yang kemudian menolak memeriksa rekening bank yang diduga menyimpan 66 Juta Dollar AS uang korupsi Estrada ini, menyebabkan pengadilan ditangguhkan untuk sementara waktu yang tidak terbatas. Keputusan tersebut kemudian memicu puluhan ribu warga Manila untuk mengakhiri kepemimpinan Estrada. Mereka menilai Senat pasti meloloskan Estrada dari tuduhan korupsi. Tepatnya tanggal 20 Januari 2001, aksi protes yang melibatkan ratusan orang berhasil mendepak Estrada dari jabatannya.

Kemudian, Gloria M. Arroyo yang menjabat sebagai Wakil Presiden menggantikan kepemimpinan Estrada. Hal ini terkait dengan konstitusi Filipina yang menyebutkan bahwa apabila seorang Presiden jatuh, maka digantikan oleh Wakil Presiden. Gloria M. Arroyo memulai karier politiknya ketika dilantik sebagai anggota Senat Filipina dan dilantik kembali tahun 1995.

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 30 Juni 1998, dia menjadi wakil presiden untuk Presiden Joseph Estrada. Arroyo mundur dari kabinet pada Oktober 2000 untuk menjauhkan diri dari Estrada yang dituduh melakukan

korupsi dan bergabung dengan rakyat Filipina dalam menyerukan agar Estrada mundur. Bahkan Arroyo melakukan manuver-manuver politik dengan menggalang dukungan militer dan gereja.

Mundurinya Arroyo dikarenakan kebijakan-kebijakan politik Estrada sudah tak sepaham dengan pemikiran politik Arroyo, dan pihak Arroyo selalu dirugikan oleh kebijakan yang diambil Estrada. Pada tanggal 20 Januari 2001, Mahkamah Agung menyatakan bahwa jabatan kepresidenan telah dikosongkan dan Arroyo pun dilantik sebagai Presiden ke-14 Filipina dengan dukungan dari banyak pihak, termasuk kepolisian dan militer.

Gloria M. Arroyo yang kemudian menjadi Presiden Filipina mendapat simpati dari rakyat. Namun pada tanggal 27 Juli 2003 sejumlah tentara mencoba melakukan kudeta militer. Kelompok militer khususnya perwira muda militer menuntut Arroyo mundur dari kepresidenan dikarenakan adanya kepentingan politis, ekonomi dan pertahanan dari beberapa fraksi militer/sebagian golongan dari militer (elit militer) yang diabaikan oleh pemerintah Arroyo, militer juga menuduh adanya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan dan juga dari para pejabat militer Filipina dalam hal ini kroni-kroni Arroyo. Kelompok militer juga menganggap tidak terdapatnya institusi lain yang berhasil menyelesaikan perekonomian Filipina yang telah hancur oleh adanya krisis yang berkepanjangan. Hal itu menunjukkan bahwa koalisi antara militer dengan Arroyo yang dulunya bekerja sama untuk menjatuhkan Estrada telah pecah.¹

¹ Kartika Ferry Effendi, *Keberhasilan People Power di Filipina*, Skripsi tidak diterbitkan, UMY, Yogyakarta, 2004, hal 24

Pada bulan Desember 2002 pernah mengumumkan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pemilu presiden tahun 2004, namun Arroyo berubah pikiran dan memutuskan untuk mengikuti pemilu. Akibatnya popularitasnya menurun. Pada pemilu 2004, Gloria M. Arroyo mendapat saingan dari Fernando Poe, Jr., seorang aktor yang populer. Namun pemilihan Presiden tersebut akhirnya dimenangkan oleh Gloria M. Arroyo dengan mengungguli satu juta suara atas rivalnya, Fernando Poe Junior.

Akan tetapi dalam pemilu Presiden tahun 2004 Arroyo dituduh telah melakukan kecurangan yaitu dengan cara menelepon salah satu anggota Komisi Pemilu Presiden. Samuel Ong seorang mantan Wakil Ketua Biro Penyidik Nasional Filipina yang muncul di depan publik untuk membocorkan rekaman pembicaraan dimana Arroyo mengerahkan seorang anggota komisi pemilu independent untuk memastikan kemenangannya.

Rekaman pembicaraan tersebut disiarkan sebuah media radio lokal, dan semakin memperkuat tuduhan kelompok oposisi bahwa Arroyo telah melakukan kecurangan pada pemilu presiden tahun 2004. Menurut para agen intelejen Filipina telah memberinya kaset percakapan Arroyo-Virrgilio yang disadap secara illegal. Rekaman kaset tersebut telah membuat Arroyo yang keluarganya –suami, anak, dan kakak iparnya- saat ini dituduh terlibat perjudian illegal semakin terpojok.

Kekesalan rakyat akan situasi ekonomi yang memburuk dan tingginya pengangguran serta membungunya harga minyak, terakumulasi dalam demonstrasi antipemerintah. Pihak oposisi mengatakan rekaman percakapan

tersebut jelas-jelas menunjukkan Arroyo menelepon demi memperbesar suara yang dia peroleh dalam pemilu telah melanggar batas-batas etika. Karena itu pihak oposisi siap mengajukan *impeachment* terhadap Arroyo kepada *House of Representatives* (Kongres).²

Kelompok Oposisi di Parlemen akhirnya mengajukan *Impeachment* terhadap Presiden Arroyo pada hari senin tanggal 25 Juli 2005 beberapa jam sebelum Arroyo menyampaikan pidato kenegaraan di depan parlemen, dengan tuduhan antara lain kecurangan pemilu, skandal penerimaan uang judi yang melibatkan keluarga Arroyo, hilangnya aset-aset Negara, pelanggaran hak asasi manusia, serta mengkhianati kepercayaan publik.

Impeachment kali ini merupakan *Impeachment* yang kedua bagi Arroyo. Sebelumnya anggota oposisi secara perorangan pernah mengajukan *impeachment* pada 27 Juni 2005. namun dasar yang digunakan untuk *impeachment* itu dianggap kurang kuat. *Impeachment* adalah permintaan untuk memberhentikan presiden / raja. Biasanya, *impeachment* diajukan jika presiden melakukan kesalahan yang fatal.³

Anggota parlemen Filipina pada hari Selasa 6 September 2005 memutuskan menolak tiga tuduhan (dari 10 tuntutan yang di ajukan oleh pihak oposisi hanya 3 tuntutan yang berhasil masuk untuk di berdebatkan dalam Kongres) yang diajukan terhadap Presiden Arroyo. Tiga tuntutan tersebut adalah Arroyo merekayasa pemilu hingga menyeret Filipina ke dalam krisis politik,

² *Kompas*, 28 Juni 2005

³ *Kompas*, 26 Juli 2005

mengkhianati publik dengan melakukan kecurangan dalam pemilu, dan keterlibatan keluarganya dalam praktek judi ilegal alias jueteng.⁴

Sampai sekarang (2005) dalam Pemerintahan Presiden Arroyo sudah beberapa kali terjadi ancaman kudeta. Salah satunya dari pihak oposisi yang menuduh terlibatnya keluarga Arroyo menerima suap dari bandar judi jueteng. Dan kasus ini yang merupakan salah satu penyebab Joseph Estrada turun dari kursi kepresidenan Filipina sebelum masa jabatannya berakhir.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dirumuskan sebuah permasalahan, yakni:

“ Bagaimana strategi Gloria Macapagal Arroyo dalam mempertahankan kursi kepresidenan?”

E. Kerangka Dasar Teori

Dalam membahas suatu permasalahan, diperlukan suatu pendekatan atau landasan teori untuk mempermudah menjawab permasalahan tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa konsep dan teori terhadap konstitusi Filipina untuk mengetahui bagaimana strategi Arroyo mempertahankan kekuasaannya.

Konsep Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” (*Stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para

⁴ <http://www.padang-ekspres.co.id/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=5> Down load : 19 September 2005

jenderalperang dalam dunia perang. Strategi selalu memberikan keuntungan untuk mencapai tujuan dengan cara tersendiri setidaknya taktik merupakan penjabaran operasional dari strategi. Dalam mencapai tujuan, pada bidang apa pun selalu ada hal yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu tindakan. Hal ini berkaitan dengan perencanaan sebelum dilakukan aksi. Sama halnya ketika hendak melakukan sesuatu agar tujuan menjadi lebih mudah tercapai, kita perlu memikirkan langkah-langkah yang akan kita ambil demi mengurangi resiko kegagalan sesedikit mungkin. Berkaitan dengan politik, strategi merupakan tentunya dengan persiapan langkah yang jitu. Sedangkan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁵

Strategi (taktik) dikenal pertama kali ketika orang meulai dapat berpikir apakah yang perlu dilakukan ketika akan melakukan perang, dalam ilmu politik strategi tidak lagi hanya digunakan dalam medan perang pertempuran, akan tetapi hampir dilakukan dalam segala aspek. Selain itu pentingnya seorang Presiden untuk mengetahui sejarah perpolitikan di negaranya untuk mengetahui bagaimana suatu negara tersebut terbentuk dari berbagai kompleksitas peristiwa.

Untuk mengetahui tingkah laku militer Filipina maka penulis menggunakan model pretorianisme:

Model Pretorianisme

Menurut Eric Nordlinger, Pretorianisme mengacu pada situasi dimana tentara tampil sebagai aktor politik utama yang sangat dominan yang secara

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1995, hal 859

langsung menggunakan kekuasaan atau mengancam dengan menggunakan kekuasaan mereka.⁶ Eric Nordlinger mengkategorikan tentara pretorian dalam 3 bentuk sebagai berikut :⁷

1. Pretorian Moderator

Dalam hal ini tentara mempunyai hak veto dalam keputusan pemerintahan maupun pertikaian politik, tanpa memegang pemerintahan itu sendiri. Walaupun pihak sipil yang memerintah, akan tetapi kekuasaan mereka diawasi oleh militer yang tidak akan menerima supremasi penuh dari pihak sipil. Pretorian moderator ini bertindak sebagai kelompok penekan yang sangat kuat dan terlibat dalam politik. Dan dalam hubungan mereka dengan pemimpin sipil, kadang kala mereka juga menggunakan ancaman kudeta. Jika diperlukan, mereka akan mengadakan suatu kudeta penggantian dimana sebuah pemerintahan digulingkan oleh sekelompok orang sipil lainnya yang dapat dikuasai dan diterima oleh militer.

2. Pretorian Pelindung

Tipe ini memegang kekuasaan pemerintahan antara 2 – 4 tahun sebelum menyerahkan kepada penguasa sipil yang baru. Dalam pandangannya tidak ada kelompok elit yang mampu menjaga status quo politik dan militer. Sasaran pretorian pelindung antara lain membasmi malpraktek dalam pemerintahan dan melakukan retribusi kekuatan dan keuntungan ekonomi diantara berbagai kelompok sipil.

⁶ Eric Nordlinger, "*Militer dalam Politik*", Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 5.

⁷ *Op Cit*, hal. 34 – 41.

3. Pretorian Penguasa

Dalam tipe ketiga ini, militer tidak hanya bertindak sebagai pengontrol pemerintahan, akan tetapi juga bertindak untuk mendominasi rezim sesekali berusaha mengontrol sebagian besar kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan menciptakan struktur mobilisasi. Tipe penguasa menganggap bahwasannya dirinya merupakan pelaku modernisasi radikal ataupun revolusioner dan tidak menjanjikan dengan jelas kembalinya rezim sipil. Perubahan-perubahan cenderung dilakukan dengan menyingkirkan hampir semua pusat kekuasaan yang ada. Monarki-monarki, oligarki tradisional dan partai politik sampai ke akar-akarnya, revitalisasi ekonomi yang tangguh disertai dengan investasi dan modernisasi besar-besaran perubahan-perubahan kondisi dan kesempatan hidup dibuktikan pada strata bawah.⁸

Seperti yang telah dijelaskan dalam teori diatas, militer Filipina telah menjadi salah satu kelompok utama yang mempunyai pengaruh besar dalam memainkan peran politik di Filipina. Militer telah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah politik domestik, sehingga seringkali melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah, bahkan melakukan usaha kudeta.

Presiden Arroyo merupakan seorang presiden yang berhasil melakukan aliansi dengan kelompok militer yang pro Arroyo untuk menyingkirkan oknum militer yang menentang Arroyo sehingga Arroyo berhasil membuat militer

⁸ *Ibid*, hal 34-41.

memberikan dukungan terhadap pemerintahannya. Hal ini terbukti dengan upaya kudeta militer dan tuntutan *impeachment* yang selalu gagal. Kekuasaan Arroyo yang dapat dipertahankan sampai sekarang salah satunya adalah karena adanya dukungan mayoritas dari kelompok militer yang pro Arroyo. Tidak seperti pada kasus Marcos dan Estrada yang tidak mendapat dukungan dari militer, sehingga kekuasaan mereka akhirnya dapat dijatuhkan oleh rakyat yang mendapat dukungan kelompok militer.

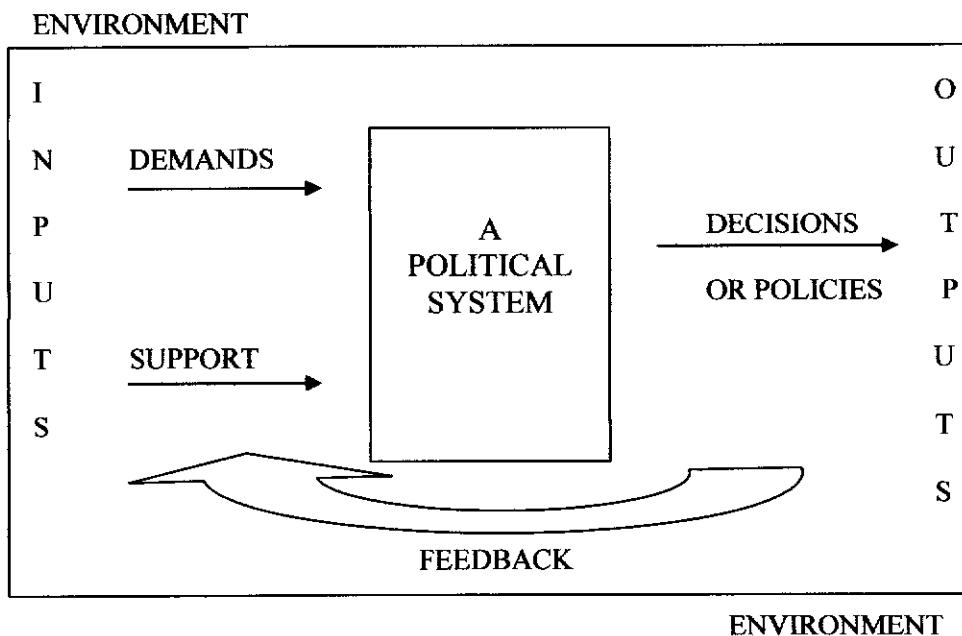
Militer Filipina dalam hal ini termasuk dalam kategori pretorian moderator. Hal ini dapat terlihat dari sejarah perpolitikan negara tersebut, yang seakan-akan perpolitikan Filipina tidak dapat dilepaskan dari peran militer. Salah satunya ditunjukkan ketika setiap kali terdapat ketidakpuasan dari kalangan militer, maka mereka berusaha untuk mendongkel pemerintahan yang sah, yang mana dalam upaya kudeta tersebut mereka berusaha untuk menekan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setidaknya hal itu dapat terlihat dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2003 setidaknya terdapat beberapa kali upaya kudeta dari kelompok militer.

Dan begitu juga militer pada masa pemerintahan Arroyo merupakan komponen yang penting di negara Filipina, karena dalam hal ini kelompok militer merupakan salah satu pendukung selain dua pendukung Arroyo lainnya yang ikut meng-*goal*-kan Arroyo untuk naik ke kursi presiden dan menggantikan Estrada. Oleh karena itu militer selalu diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan negara, baik yang berkaitan dengan masalah politik, sosial maupun ekonomi. Sehingga

dengan terbukanya pemerintahan Arroyo terhadap campur tangan militer menjadikan militer berpengaruh dalam segala aspek kehidupan di Filipina.

Mekanisme Impeachment Dalam Sistem Politik Filipina

Untuk melihat proses *impeachment* yang terjadi di Kongres Filipina, penulis menggunakan pendekatan berdasarkan teori dari Gabriel Almond mengenai sistem politik⁹, seperti yang digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan teori tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebuah kebijakan berawal dari adanya tuntutan dan dukungan terhadap sebuah kebijakan dari publik sehingga kemudian ditampung menjadi sebuah aspirasi yang kemudian dibahas dalam sebuah sistem politik. Hasil pembahasan tersebut kemudian akan menjadi sebuah keputusan atau kebijakan. Keputusan atau

⁹ Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Libery, Yogyakarta, 1982, hal 9

kebijakan tersebut kemudian akan mengalami uji publik yang dapat menjadi tuntutan baru terhadap sistem politik tersebut.

Dalam konteks tuntutan *impeachment* terhadap Presiden Gloria M. Arroyo, tuntutan tersebut berasal dari kelompok oposisi dengan tuduhan bahwa Arroyo merekayasa pemilu hingga menyeret Filipina ke dalam krisis politik, mengkhianati publik dengan melakukan kecurangan dalam pemilu, dan keterlibatan keluarganya dalam praktek judi ilegal alias jueteng. Tuntutan tersebut kemudian dibahas di Kongres hingga akhirnya dilakukan voting. Dalam sistem politik Filipina, sebuah tuntutan akan disahkan Apabila sebuah keputusan atau kebijakan jika memenuhi minimal 1/3 suara anggota Kongres. Seperti terdapat di Konstitusi 1987 Filipina article XI tentang Accountability of Public Officers section 3 (4).

Arroyo yang merupakan pemimpin *Lakas-CMD* merupakan partai yang mempunyai anggota di *House of Representatives* paling banyak dan mendapat suara mayoritas dalam parlemen dengan adanya koalisi K-4 (*Koalisyon ng Katapatan sa Kinabukan / Coalition of Truth and Experience for Tommorrow*) dengan tidak kesulitan menghadang laju *impeachment*. K-4 yang beranggotakan partai-partai besar dan berpengaruh di Filipina yaitu *The Nacionalist People's Coalition*, *The Liberal Party*, *The Kabalikat ng Mamayang Pilipino (KAMPI)*, *The Nacionalista Party*, *Lakas-Cristian Muslim Democrats (Lakas-CMD)*, dan *The People's Reform Party*. Koalisi tersebut menguasai House of Representatif dengan menduduki sekitar 180 kursi dari 236 kursi.¹⁰

¹⁰ <http://www.congress.gov.ph/members/index.php> down load 7 Januari 2006

Bila dilihat dari hasil voting tersebut, nampak jelas bahwa anggota parlemen Filipina secara mayoritas masih menginginkan Arroyo menjadi presiden Filipina. Dengan menolak tuntutan *impeachment* dari kelompok oposisi, maka kita dapat melihat besarnya dukungan dari parlemen terhadap pemerintahan Arroyo. Hal ini menunjukkan keberhasilan Arroyo dalam menguasai suara parlemen agar memberikan dukungan terhadap pemerintahannya.

F. Hipotesis :

Dari latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan yang dikaitkan dengan teori yang saya kemukakan diatas, maka dapat diketahui bagaimana strategi Gloria Macapagal Arroyo dalam mempertahankan kursi kepresidenan:

1. Menggagalkan kudeta militer 27 Juli 2003
2. Kemenangan Arroyo dalam Pemilu Presiden 2004
 - a. Memanfaatkan posisi "*incumbent*"
 - b. Penggerakan mesin partai
3. Dalam kecurangan Pemilu tahun 2004
 - a. Meng-*counter* Cd Hello Garcie
 - b. Pengembalian citra diri (image) Presiden
 - c. Menghalau laju tuntutan *impeachment*
 - d. Dukungan Gereja
 - e. Dukungan Militer

G. Metodologi Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam hal ini mengenai strategi Gloria Macapagal Arroyo mempertahankan kursi kepresidenan.

Data-data yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menjawab permasalahan. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal-jurnal di Internet dan CD&DVD-Rom, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Jangkauan Penulisan

Agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih kongkrit, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Jangkauan penulisan di mulai sejak Gloria Macapagal Arroyo menjabat sebagai Presiden pada tahun 2001 menggantikan Estrada sampai pada bulan akhir tahun 2005, yakni ketika adanya tuduhan kecurangan Pemilu dan skandal suap yang melibatkan keluarganya hingga muncul tuntutan *impeachment* dari kelompok oposisi. Dengan jangkauan penelitian tersebut, kemudian penulis berusaha untuk memberikan fokus utama pada strategi Gloria Macapagal Arroyo dalam mempertahankan kursi

kepresidenan yang terjadi pada akhir tahun 2005 ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menulis beberapa data yang berada di luar batasan tersebut untuk lebih memperkuat dan dijadikan data pendukung bagi penulis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi kali ini terbagi kedalam lima bab, yang masing-masing bab nantinya akan mendiskripsikan secara lebih jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori yang digunakan, hipotesa, metodologi penulisan, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : POLITIK DAN PEMERINTAHAN FILIPINA

Dalam bab kedua ini penulis akan membahas mengenai politik dan pemerintahan Filipina baik secara umum, seperti misalnya pemilihan umum, partai politik dan parlemen di Filipina maupun politik dan pemerintahan Filipina secara khusus di bawah kendali pemerintahan Arroyo.

BAB III : PERAN MILITER DALAM PERPOLITIKAN FILIPINA DAN
USAHA MENGGAGALKAN KUDETA MILITER

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana Arroyo mempertahankan militer yang pro-arroyo agar tetap mau menjadi pendukungnya dan upaya Presiden Arroyo untuk menyingkirkan oknum-oknum militer yang menentangnya.

BAB IV : STRATEGI GLORIA MACAPAGAL ARROYO DALAM
MEMPERTAHANKAN KURSI KEPRESIDENAN

Dalam pembahasan bab ini, penulis berusaha untuk memaparkan bagaimana upaya-upaya Arroyo untuk mempertahankan kursi kepresidenan hingga terbebas dari ancaman *impeachment*, serta analisa terhadap komposisi anggota parlemen Filipina.

BAB V : KESIMPULAN

Bab kelima ini merupakan penutup yang sekaligus sebagai kesimpulan dari seluruh tulisan yang ada.